

Wapres: Aksi Bom Bunuh Diri Contoh Cara Berpikir Sempit

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebutkan orang yang tak percaya ada Covid-19 dan yang melakukan aksi bom bunuh diri merupakan contoh cara berpikir sempit yang tidak terbuka dengan perubahan zaman.

Pernyataan ini disampaikan Ma'ruf Amin saat menjadi pembicara di acara Webinar Nasional IKADI dan BNPT, Minggu (4/4).

"Contoh sederhana cara berpikir sempit adalah tidak percaya bahwa Covid-19 adalah nyata, atau percaya pada teori-teori konspirasi tanpa mencoba untuk memahami fenomena dengan akal sehat, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan," ujar Ma'ruf.

Tak hanya itu, kata Ma'ruf Amin, cara berpikir sempit juga merupakan salah satu penyebab munculnya sifat egosentris, tidak menghargai perbedaan pendapat serta tidak mau berdialog.

Menurutnya, cara berpikir sempit juga bisa melahirkan pola pikir yang menyimpang dari arus utama atau bahkan menjadi radikal, sehingga dapat menjurus

pada penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. "Contoh paling aktual dari cara berpikir radikal terorisme yang menyimpang itu adalah peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021," ujarnya.

Ma'ruf memandang, tindakan ini tidak sesuai dengan ajaran islam karena islam tidak mengajarkan kekerasan dan pemaksaan kehendak (ikrah-yyan) di dalam dakwahnya dan juga dalam memperjuangkan aspirasi melawan ketidakadilan.

Sebaliknya, islam mengajarkan cara-cara yang santun (layyinan), dan dilakukan dengan cara-cara nasihat yang baik (mau'izhah hasanah), serta berdialog dengan cara-cara yang terbaik (mujadalah billati hiya ahsan).

"Cara berfikir sempit seperti itu menghambat dan kontra produktif terhadap upaya membangun kembali peradaban Islam. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa banyak negara berpenduduk muslim masih mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi, pendidikan, iptek dan bidang lainnya," ujarnya. ●mei

PKS Siap Berkompetisi Lawan Partai Masyumi Reborn

JAKARTA (IM) - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap berkompetisi dengan Partai Masyumi Reborn (PMR). Sebelumnya, Mardani mengucapkan selamat atas struktur kepemimpinan baru Partai Masyumi Reborn periode 2021-2026.

"Pertama, mengucapkan selamat bekerja untuk Partai Masyumi Reborn dan mendoakan yang terbaik. PKS siap bekerja sama dengan semua partai untuk membangun Indonesia yang adil dan sejahtera baik partai Islam maupun partai nasionalis," kata Mardani, Minggu (4/4).

"Siap untuk berkompetisi dan PKS karena partai kader punya basis yang insyaallah kokoh," kata Mardani.

Mardani menerangkan partainya akan tetap konsisten menjadi partai o-

posisi. Dia mengajak seluruh masyarakat turut serta berkarya dan berada gagasan untuk menyempurnakan Indonesia.

"Kedua, Indonesia memang belum sempurna tapi itu tanggung jawab kita semua dan PKS akan tetap istikamah menjadi partai oposisi. Ketiga, mari kita penuh ruang publik dengan kontestasi karya dan gagasan," katanya.

Diketahui sebelumnya, Partai Masyumi membentuk struktur kepemimpinan DPP untuk periode 2021-2026. Ahmad Yani didapuk menjadi ketua umum partai.

Pengumuman dibacakan oleh Sekretaris Majelis Syuro DPP Partai Masyumi Abbas Thaha dalam konferensi pers dan peringatan "Mosi Integral Mohammad Natsir 1950" yang digelar di Jakarta, Sabtu (3/4).

Majelis Syuro DPP Partai Masyumi memilih Ahmad Yani sebagai ketua umum. Ahmad Yani didampingi oleh lima wakil ketua umum, salah satunya Alfian Tanjung. ●han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



AKSI SOLIDARITAS KERUKUNAN BERAGAMA DI MAKASSAR

Peserta aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu membagikan bunga kepada jemaat Katolik saat melakukan aksi solidaritas di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/4). Aksi yang digelar dari berbagai elemen mahasiswa, tokoh agama, serta masyarakat tersebut sebagai aksi solidaritas kerukunan beragama guna mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap solid dan mendeklarasikan diri untuk melawan aksi terorisme.

Presiden Jokowi Beri Bantuan kepada Istri Terduga Teroris di Sukabumi

Bantuan Presiden Jokowi berupa uang tunai dititipkan kepada Kapolres Sukabumi untuk kemudian diserahkan kepada SA, istri terduga teroris yang ditangkap polisi.

SUKABUMI (IM) - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pesan untuk keluarga terduga teroris di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, melalui Kapolres Sukabumi AKBP Lukman Syarif di Sukabumi.

"Saya dihubungi Staf Kepresidenan untuk menyampaikan pesan dan amanah untuk keluarga terduga teroris yang mengontrak rumah di Kampung Limbangan, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi," kata Kapolres Sukabumi AKBP M. Lukman Syarif melalui Paur Humas

Ipda Aah Saepul Rohman di Sukabumi, Sabtu (3/4).

Menurut dia, ada beberapa pesan dari Presiden Jokowi yang disampaikan langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Lukman Syarif kepada SA (25) yang merupakan istri terduga teroris.

Selain itu, Presiden memberikan bantuan uang tunai untuk istri terduga teroris itu karena yang bersangkutan terilit utang dan masih memiliki bayi berusia beberapa bulan.

Presiden, kata dia, mengetahui istri dan anak terduga teroris dalam kondisi mempri-

hatinkan akibat ulah suaminya yang terlibat dalam organisasi terorisme setelah membaca pemberitaan di media daring.

Dijelaskan Aah bahwa bantuan tersebut berupa uang tunai yang dititipkan kepada Kapolres Sukabumi dari Staf Kepresidenan.

Ja menegaskan bahwa santunan ini pun murni bantuan dan tidak ada maksud lain.

"SA istri terduga teroris ini pun berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah merespons keluhannya karena terilit utang bank dan masih mempunyai bayi sehingga beban keluarga sangat berkurang," katanya.

Di sisi lain, SA mengaku tidak mengetahui bahwa suaminya bisa terjerumus dan bergabung dengan jaringan teroris karena selama berumah tangga, suaminya tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan.

"Tentunya saya awalnya

tidak percaya bahwa suami terlibat kasus terorisme, yang saya tahu memang suami bekerja di Jakarta dan pulang saat libur dan kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja," katanya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu tim Densus 88 Mabes Polri menggeledah salah satu rumah di Kampung Limbangan, Desa Cibodas,

Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi yang diketahui memang suami bekerja di Jakarta dan pulang saat libur dan kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja," katanya.

Dari hasil penggeledahan itu, polisi menyita beberapa barang bukti dari rumah terduga teroris yang diduga ada kaitannya dengan aktivitas jaringan teroris. ●han

Demokrat Ogah Tanggapi Kubu Moeldoko yang Dorong AHY Maju Lagi di Pilgub DKI

JAKARTA (IM) - Partai Demokrat (PD) memandang sebelah mata sikap kubu Moeldoko yang mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju lagi di Pilgub DKI Jakarta.

Wasekjen PD, Irwan menegaskan bahwa AHY saat ini sedang befokus membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

"Rahmad siapa? Saya tidak kenal. Tentu tidak produktif untuk saya respons. Apalagi Ketum AHY dan kader Partai Demokrat sekarang fokus kerja untuk rakyat. Lebih baik pikirkan solusi dan aksi ringkasan penderitaan rakyat saat ini," kata Irwan, kepada wartawan, Minggu (4/4).

Irwan juga menekankan tidak ada dualisme di internal Partai Demokrat. Dia menyebutkan para pihak yang mengaku memiliki hak terhadap Partai Demokrat sebagai gerombolan pelanggar hukum.

"Saat ini Partai Demokrat sangat solid bersama Ketum AHY. Tidak ada dualisme di Partai Demokrat. Jika ada yang ngaku-ngaku, maka itu gerombolan pelanggar hukum," sebut Irwan.

Lebih lanjut, Irwan menjelaskan saat ini Partai Demokrat juga membantu memulihkan ekonomi nasional. Anggota DPR RI itu mengatakan masyarakat tengah berharap pandemi

COVID-19 segera berakhir.

"Harapan rakyat bagaimana pandemi COVID-19 bisa berakhir dan ekonomi nasional bisa pulih kembali, fokus Demokrat di sini. Bantu rakyat yang susah. Harapan rakyat ini yang fokus diperjuangkan," tutur Irwan.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menolak pengurusan Partai Demokrat pimpinan Moeldoko. Meski ditolak, kubu Moeldoko justru berencana mengusulkan Ketum PD AHY maju di Pilgub DKI Jakarta.

"DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko justru berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Kami melihat, AHY sangat serius untuk melanjutkan karirnya yang terhenti tiba-tiba di militer. Tentunya keputusan SBY yang meminta AHY berhenti dari militer dengan pangkat mayor adalah pertimbangan AHY yang akan diusung menjadi Gubernur DKI," kata juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, kepada wartawan, Minggu (4/4).

"Coret-coreitanya tentu waktu itu menang. Kalau coret-coreitanya kalah, tentu tak mau mundur dari karir militer. Adik kelas AHY saja sekarang sudah berpangkat letnan kolonel di TNI," imbuhnya. ●han

Terlibat Insiden, Pilot Batik Air dan Trigana Air Dilarang Terbang

JAKARTA (IM) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak membolehkan terbang sementara atau melakukan tindakan pencegahan terbang (preventive grounding) terhadap pilot Batik Air dan Trigana Air yang terlibat insiden dan kecelakaan pada Maret lalu.

Insiden yang dimaksud itu terjadi di Bandara Sultan Thaha-Jambi dan Bandara Halim Perdanakusuma-Jakarta. "Yang dilarang pilot yang terkait kejadian, bukan airlines-nya," ujar Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto saat dihubungi, Minggu (4/4).

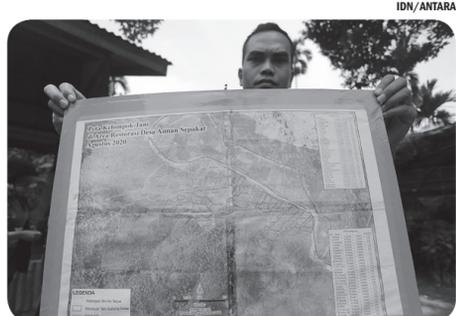
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Dadun Kohar. Dia menyebut tindakan pencegahan terbang terhadap penerbang yang mengalami insiden pesawat pada saat penerbangan ditujukan untuk memudahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam melakukan pemeriksaan.

"Seluai dengan Pasal 4 PM 46 Tahun 2015, bagi penerbang yang mengalami insiden pada penerbangan akan dilakukan tindakan pencegahan terbang, untuk selanjutnya dilakukan

pemeriksaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari hari terjadinya insiden," kata Dadun Kohar dalam keterangan tertulis.

Pencegahan terbang ini dapat dicabut setelah pilot Batik Air dan Trigana Air yang dimaksud dinyatakan fit secara medis di Balai Kesehatan Penerbangan. Tak hanya itu, larangan terbang sementara juga dapat dicabut setelah pilot dari dua maskapai itu selesai mengikuti recovery training program after incident yang diawasi oleh Inspektur Operasi Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

"Kami akan cabut preventive grounding-nya jika penerbang yang bersangkutan telah dinyatakan sehat setelah melaksanakan pemeriksaan di Balai Kesehatan Penerbangan. Selain itu, mereka juga harus mengikuti training yang diawasi oleh Inspektur Operasi Pesawat Udara. Namun, apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan pada PM 78 Tahun 2017 atau pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara," ucapnya. ●mei



IDN/ANTARA

RESTORASI HUTAN DI KAWASAN TNGL

Petugas menunjukkan peta area restorasi di tempat pembibitan pos pemulihan fungsi hutan Desa Aunan Seupakat, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara, Aceh, Minggu (4/4). Menurut data Forum Konservasi Leuser (FKL), sejak Januari 2020 sampai April 2021 telah ditanam bibit pohon sebanyak 9.350 batang untuk pemulihan fungsi ekosistem hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

KSAD Pastikan Masuk Tamtama TNI Gratis, Waspada Penipuan

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI, Jenderal Andika Perkasa menggelar teleconference bersama para orang tua yang anaknya menjadi calon prajurit Tamtama TNI AD. Kegiatan itu dilakukan untuk memberikan informasi tentang mekanisme penerimaan calon prajurit TNI AD.

Pada kesempatan itu Andika memberikan tiga nomor handphone dan satu nomor telepon kabel sebagai nomor aduan jika ada oknum yang menawarkan bantuan dengan cara meminta imbalan.

"Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian singkat saja pertemuan siang ini kami hanya ingin menjelaskan sekali lagi, bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh putra dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian itu tidak ada sama sekali kewajiban apapun bentuknya untuk membayar. Jadi masuk untuk jadi Tamtama TNI AD itu gratis, jadi jangan sampai nanti ada orang yang pesan kepada dari putra bapak-bapak, ibu-ibu, atau bahkan ada yang datang nanti ke bapak-bapak atau ibu-ibu bilang bahwa

bisa bantu masuk itu tidak benar," kata Andika dalam akun media sosial resmi TNI AD, Minggu (4/4).

Andika juga menyampaikan bahwa yang bisa membantu putra bapak-bapak dan ibu-ibu masuk adalah diri sendiri dari pada calon pendaftar, karena TNI AD telah benar-benar menyusun tahapan ujian untuk para calon prajurit dan sesuai dengan kemampuannya.

"Nomor Handphone yang kami berikan adalah untuk pengaduan para orang tua jika ada oknum menjanjikan bisa membantu dengan cara membayar. Kalau ada seperti itu segera laporkan. Karena penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat berdasarkan hasil test yang sudah ditentukan TNI AD," ujar Andika.

Disisi lain, Andika berpesan jika gagal dipendaftar, jangan menyerah teruslah berusaha, apa yang menjadi kekurangan pada diri kita segera perbaiki, dan coba lagi di tahun depan, karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. ●han

Mendagri Tegur Gubernur Papua karena ke Papua Nugini Numpang Ojek

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Gubernur Papua Lukas Enembe lantaran melakukan kunjungan ke Papua Nugini (PNG) melalui jalur tikus. Ia dianggar menempuh perjalanan luar negeri tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tegur itu disampaikan Tito melalui surat resmi bernomor 098/2081/OTDA yang diteken Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, pada 1 April 2021.

"Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, mengingatkan sekaligus memberikan teguran agar dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur senantiasa menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kunjungan ke luar negeri," demikian bunyi petikan surat teguran tersebut.

Dalam surat teguran itu

disebutkan bahwa kunjungan kepala daerah ke luar negeri baik untuk kepentingan kedinasan atau alasan penting lain telah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Kemudian, sesuai dengan bunyi Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan, kepala daerah punya kewajiban untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Selanjutnya agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 373 Ayat (1) dan Pasal 374 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014."

Ditegaskan pula dalam surat teguran tersebut, jika Lukas Enembe kembali melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tidak melalui mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Lukas Enembe jadi sorotan publik beberapa hari ini. Pasalnya ia dideportasi dari Papua Nugini karena dianggap melanggar aturan keimigrasian. Lukas Enembe masuk ke Papua Nugini untuk pergi ke Kota Vanimo pada Selasa (31/3).

Ia menyelip lewat jalur tikus, lalu diantar ke kota perbatasan itu menggunakan jasa tukang ojek. Di Vanimo, Lukas mengaku berobat dan menjalani terapi karena sakit yang dideritanya. Setelah selesai berobat di sana, ia kemudian kembali ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Jayapura. ●han



IDN/ANTARA

AKSI TOLAK DOKTRIN TERORISME

Kopral (Purn) Partika Subagyo melakukan aksi Tolak Doktrin Terorisme di kawasan Gladag, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (3/4). Aksi tersebut untuk menentang aksi terorisme dan radikalisme sekaligus menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk mengawasi generasi muda Indonesia agar tidak terpengaruh doktrin teroris.